

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sebuah proses pengembangan diri melalui usaha sadar dan terencana agar memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Proses ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, diwujudkan melalui suasana belajar dan proses pembelajaran. Suasana dan proses pembelajaran tersebut dikembangkan dalam rangka melahirkan manusia berkualitas agar nanti mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dalam upaya terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas maka mutlak diperlukan pendidikan yang berkualitas juga. Dengan pendidikan yang berkualitas atau bermutu maka proses transformasi informasi dan pengetahuan berjalan secara maksimal dan sistematis, sehingga secara bertahap akan mampu membentuk sumber daya manusia yang berkarakter dan bermutu dalam menyongsong era globalisasi.

Secara spesifik, ada beberapa permasalahan pendidikan yang menjadi parasit dalam perkembangan pendidikan di Indonesia menyongsong era global. Permasalahan tersebut yaitu *Pertama*, Rendahnya mutu pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh implementasi pendidikan yang kurang benar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Idrus (2009:126) bahwa kurang optimalnya

pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaannya yang masih jauh dari optimal. Implementasi pendidikan yang kurang benar.

Kondisi mutu pendidikan sekarang ini dirasakan sangat parah dalam berbagai jenjang, baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi (Suhardan, 2010:2). Walaupun dalam berbagai olimpiade internasional peserta dari Indonesia telah berhasil mengukir prestasi dengan meraih medali emas, perak, dan perunggu sebagai salah satu tanda mutu yang tinggi, secara global, mutu pendidikan Indonesia masih termasuk rendah. Pada level regional, kualitas pendidikan Indonesia relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan pencapaian negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi yang diselenggarakan oleh IEA (*International Organization for Evaluation of Educational Achievement*) yang juga diikuti oleh Indonesia bersama beberapa negara lainnya dalam TIMSS (*Trends in International Mathematic and Science Study*). Study PISA (*Programme for International Student Assesment*) yang diselenggarakan oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) pada tahun 2006 menunjukkan bahwa skor Tes PISA pada aspek literasi, numerasi, dan sains masih lebih rendah dari skor negara-negara non-OECD dan negara-negara OECD. Pada kondisi tersebut Indonesia menduduki urutan kelima dari bawah dari 54 negara. Berdasarkan parameter EDI (*Education Development Index*) Indonesia menduduki peringkat 71 (medium EDI). Data tersebut di atas menunjukkan bahwa dilihat dari segi mutu, Indonesia masih tergolong negara dengan mutu pendidikan yang belum dapat dibanggakan (Depdiknas, 2009:48-49).

Kedua, Kemampuan kognitif lulusan SMP, SMA, dan SMK masih relatif rendah. Contoh faktual dapat dilihat dari persentase kelulusan peserta ujian nasional mulai jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B dari tahun ajaran 2004/2005 sampai tahun 2007/2008 mengalami kenaikan walaupun tidak secara konsisten atau berfluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-rata nilai UN SMP/MTs pada tahun 2008 adalah sebesar 6,87 dengan tingkat kelulusan sebesar 92,76%. Rata-rata nilai ujian SMP/MTs tersebut masih di bawah target 2008, yaitu 7. Hal ini mengkhawatirkan karena di samping target nasional tidak tercapai, juga tingkat kelulusan masih di bawah 95%. (Resntra Kemdiknas 2010-2014:8)

Ketiga, Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas. Masih banyak ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/berat, dan masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. Dari data Depdiknas (sekarang Kemdiknas) tahun 2007/2008, kondisi ruang kelas untuk SD/MI yang berada dalam kondisi rusak ringan dan berat sebesar 47,9%, untuk SMP/MTs sebesar 20,1%, dan untuk SMA/SMK adalah 10,1%. Hal ini belum lagi ditinjau dari sarana dan prasarana yang masih minim, seperti perpustakaan, laboratorium multimedia, laboratorium IPA, komputer, dan sebagainya. Lebih tajam lagi, Idrus (2009:131) menyatakan bahwa carut marut dunia pendidikan kita ditandai dengan semakin parahnyanya dan tidak meratanya sarana dan prasarana pendidikan.

Keempat, Manajemen dan tatakelola satuan pendidikan belum efektif. Pengambilan kebijakan pendidikan di sekolah masih belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan manajerial yang mapan, sehingga setiap kebijakan pendidikan mengalami kendala kapasitas pada tataran pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini

senada dengan yang disampaikan Taufik Hanafi dalam Simposium Nasional Hasil Penelitian dan Inovasi Pendidikan, Balitbang Kemdiknas, 24 Agustus 2010 bahwa kemampuan manajemen dan tatakelola mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah. Idrus (2009:127) secara gamblang membenarkan fenomena tersebut, di mana dinyatakan bahwa masih banyaknya sekolah belum melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dengan benar.

Berdasarkan keempat permasalahan yang mengemuka tersebut di atas, disimpulkan bahwa selama ini upaya peningkatan mutu pendidikan yang sedang dan telah dilaksanakan baru menyentuh sisi teknis dari pendidikan. Banyak sisi lainnya yang memiliki dampak penting terhadap mutu pendidikan, tetapi belum kita sentuh, seperti mobilisasi kekuatan daerah dan satuan pendidikan, kemandirian, dan aspek-aspek lain yang menyangkut otonomi dan profesionalisasi. Melalui upaya penerahan kekuatan daerah dan satuan pendidikan (desentralisasi) akan mampu secara *sustainable* meningkatkan mutu pendidikan (Suryadi & Tilaar, 1993:159). Benang merah yang dapat ditangkap dari pernyataan tersebut adalah penerahan kekuatan dalam lingkup otonomi di tingkat satuan pendidikan merupakan salah satu cara efektif dalam menunjang berbagai kebijakan pemerintah dalam implementasi penjaminan mutu di sekolah. Sehingga respons pemimpin satuan pendidikan (kepala sekolah) akan sangat menentukan jalannya setiap program dan kegiatan dalam upaya penjaminan mutu.

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004) telah membawa sejumlah perubahan dalam tatanan pemerintahan, terutama

diserharkannya sejumlah kewenangan kepada daerah, yang semula menjadi urusan pemerintah pusat. UU yang telah berlaku secara resmi di seluruh Wilayah Republik Indonesia sejak bulan Januari 2001 ini pada hakikatnya merupakan pemberian kewenangan dan keleluasaan pada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam segala urusan, kecuali urusan tertentu yang masih menjadi urusan pemerintah. Salah satu urusan yang diurus oleh pemerintah daerah adalah bidang pendidikan. Otonomi bidang pendidikan berbeda dengan otonomi di bidang pemerintahan lainnya yang berhenti pada tingkat kabupaten/kota. Otonomi di bidang pendidikan tidak hanya berhenti pada tingkat kabupaten/kota, tetapi sampai pada ujung tombak pelaksana pendidikan di lapangan, yaitu satuan pendidikan. Sehingga satuan pendidikan merupakan muara otoritas manajemen pendidikan sebagai wujud dari implementasi kebijakan pendidikan.

Walaupun otonomi di bidang pendidikan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan satuan pendidikan, namun pada kenyataannya tidak serta merta segala sesuatunya diurus oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Pemerintah pusat dapat melakukan intervensi dalam bidang pendidikan dalam rangka melaksanakan program nasional pendidikan, seperti intervensi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan. Pemerintah juga dapat mendorong pemerintah daerah agar lebih berkonsentrasi untuk mengembangkan berbagai keunggulan daerahnya untuk dirumuskan dalam kebijakan pendidikan di daerah serta memberikan respons yang baik dalam menerima kebijakan nasional pendidikan.

Pendidikan yang bermutu telah lama diidam-idamkan oleh masyarakat, khususnya dalam menghadapi era persaingan bebas yang mengharuskan sumber daya manusia Indonesia memiliki kompetensi dan daya kompetitif yang tinggi. Terwujudnya pendidikan yang bermutu lahir dari sebuah kebijakan yang mendukung terlaksananya sistem yang bermutu juga. Sehingga kebijakan tentang sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan bentuk nyata dari diakuinya eksistensi otonomi daerah dalam merencanakan dan melaksanakan peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan di daerah.

Peran dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penjaminan mutu sangat signifikan. Pemerintah bertanggung jawab dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan secara nasional yang memiliki dampak terhadap peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Sementara itu, pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dan keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di daerah termasuk di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena otonomi pengelolaan pendidikan berada di tingkat satuan pendidikan, maka peran kepala sekolah sangat menentukan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan agar proses pendidikan berjalan secara efektif dan efisien.

Otonomi pendidikan walaupun memberikan kewenangan yang besar bagi daerah dan satuan pendidikan untuk secara kreatif mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah, namun tetap dilaksanakan dalam koridor kebijakan

pendidikan nasional. Pemberlakuan otonomi pendidikan di daerah memiliki nilai signifikan bagi daerah untuk berkompetisi secara progresif dalam upaya membangun dan memajukan pendidikan di daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan sumber daya manusia dan alamnya. Dengan adanya desentralisasi pendidikan tersebut pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berkewajiban untuk mengupayakan secara maksimal pembangunan pendidikan yang terencana, terarah dan berkesinambungan. Begitu juga halnya dengan kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan di tingkat satuan pendidikan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam ke-otonomiannya untuk memajukan pendidikan di satuan pendidikan yang dikelolanya.

Kepala sekolah merupakan sosok sentral dalam proses pengembangan satuan pendidikan. Peran dan tanggung jawabnya sebagai salah satu pelaku utama dan terdepan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan satuan pendidikan. Dengan kewenangannya sebagai pemimpin institusi profesional kependidikan di era otonomi satuan pendidikan, kepala sekolah pada dasarnya merupakan figur penentu terhadap perubahan corak dan rona pendidikan di sekolah. Hal ini didasari oleh berbagai pelaksanaan keputusan manajemen dan kebijakan satuan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam lingkup kewenangannya dalam upaya mencapai tujuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kepala sekolah selaku pengelola satuan pendidikan harus mampu meluruskan kemampuan internalnya

dalam merespons berbagai kebutuhan yang mendesak dari lingkungan pendidikan. Kepala sekolah harus bisa memahami berbagai perspektif dalam merumuskan program-program pendidikan, memahami tujuan dan maksud yang sedang dikejar oleh usaha pembangunan serta masalah dan isu yang terlibat di dalamnya, seperti masalah penjaminan mutu pada satuan pendidikan (Rohiat, 2008:2).

Sejalan dengan hakikat diberlakukannya otonomi satuan pendidikan tentunya berimplikasi terhadap luasnya peran, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, terutama dalam pengelolaan pendidikan. Artinya, pendidikan sudah menjadi aset mutlak milik satuan pendidikan dan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah, sehingga kepala sekolah harus senantiasa mampu meningkatkan kemampuannya dalam proses dan tahap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah agar sejalan dengan kebijakan pendidikan yang digariskan pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya penjaminan mutu pendidikan secara nasional harus diterapkan di daerah. Sementara itu, dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan kebijakan nasional pendidikan melalui kebijakan operasional pendidikan yang akan diterapkan di satuan pendidikan sangat diperlukan, sebab daerah lah yang lebih mengetahui kondisi dan karakteristik daerahnya berdasarkan *input* dari satuan pendidikan.

Ironisnya, fenomena yang terjadi dan kerap muncul dalam keberlangsungan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah menuju pendidikan bermutu adalah kemampuan dan akseptabilitas kepala sekolah dalam

merespons berbagai kebijakan, baik kebijakan pusat maupun daerah dalam upaya peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Sehingga gerak maju pembangunan pendidikan di sekolah menjadi lambat dan bahkan cenderung stagnan. Respons kepala sekolah sebagai pemimpin di satuan pendidikan dalam menyikapi kebijakan pendidikan berpengaruh kepada kelancaran implementasi kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Dengan dilatarbelakangi oleh fenomena di atas, peneliti mencoba menganalisa bagaimana respons kepala sekolah tentang kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan.

B. Identifikasi Masalah

Kebijakan otonomi satuan pendidikan merupakan strategi demokratisasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang menekankan pada desentralisasi otoritas kepada satuan pendidikan. Otonomi satuan pendidikan bertujuan untuk mendudukkan satuan pendidikan menjadi subyek yang mandiri, akuntabel, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan. UU Sisdiknas menganggap begitu pentingnya otonomi satuan pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, otonomi diwujudkan dalam bentuk manajemen berbasis sekolah/madrasah. Berbeda dengan kebijakan pendidikan sentralistik, dimana otoritas satuan pendidikan bersumber dari satu otoritas penyelenggaranya berupa delegasi kewenangan. Otonomi satuan pendidikan memberikan ruang dan mendorong satuan pendidikan untuk mandiri, akuntabel, kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan.

Dengan pemberian otonomi kepada satuan pendidikan maka peran kepala sekolah sangat besar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Kepala sekolah mengatur berjalannya proses pendidikan di satuan pendidikan dan memastikan terwujudnya budaya pendidikan yang sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Kewenangan kepala sekolah akan berdampak terhadap seberapa jauh reaksi, tanggapan, dan jawaban kepala sekolah dalam menyikapi implementasi penjaminan mutu di sekolahnya sebagai bagian dari kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun yang dikembangkan atau dijabarkan oleh pemerintah daerah.

Dengan lahirnya berbagai kebijakan pendidikan dalam skala pembangunan pendidikan nasional menandakan keseriusan pemerintah pusat dalam upaya percepatan pembangunan pendidikan khususnya pada peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan penjaminan mutu yang dikembangkan diberlakukan secara nasional dan pemerintah daerah turut serta mendukung keberlanjutan kebijakan ini baik melalui kebijakan-kebijakan taktis maupun operasional. Kebijakan taktis yang dimaksud dapat berupa peraturan-peraturan daerah yang mendukung kebijakan penjaminan mutu di daerah, sedangkan operasional dapat berupa pedoman atau petunjuk pelaksana (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) operasional pendidikan yang dikeluarkan melalui dinas pendidikan di daerah. Dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini sudah jelas bahwa penerapannya ditujukan kepada satuan pendidikan, sebab satuan pendidikan merupakan ujung tombak dari upaya perbaikan, peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. Sementara itu, kepala sekolah sebagai pemegang kewenangan

pengelolaan pendidikan di sekolah menentukan arah dan tujuan sekolah yang dipimpinnya berdasarkan visi dan misi yang telah dirumuskan. Dengan kewenangannya yang luas itu, kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Sehingga respons kepala sekolah dalam menyikapi kebijakan pemerintah tersebut khususnya dalam implementasi penjaminan mutu sangat urgen. Signifikansi reaksi, tanggapan atau jawaban kepala sekolah terhadap kebijakan tersebut akan mempermudah terlaksananya penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

C. Batasan Masalah

Kebijakan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan merupakan kebijakan terobosan yang bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar pada satuan pendidikan untuk mengelola kegiatan pendidikan dengan menggali potensi dan kekuatan yang ada, kemudian mengembangkan dan memanfaatkannya untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Implementasi penjaminan mutu sebagai bagian dari kebijakan pendidikan tidak akan berhasil dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan jika tidak ada tindak lanjut dari satuan pendidikan itu sendiri.

Dalam pelimpahan urusan pendidikan di daerah dengan prinsip otonomi, daerah diberi kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan daerah di bidang pendidikan. Dengan desentralisasi manajemen pendidikan tersebut, Dinas pendidikan tingkat kabupaten/kota sebagai perangkat pemerintah daerah yang otonom dapat membuat kebijakan-kebijakan pendidikan, bahkan dalam

pengelolaan pendidikan setiap sekolah juga diberi peluang untuk membuat kebijakan sekolah (*school policy*) atas dasar konsep manajemen berbasis sekolah. Dengan demikian, perubahan dan kemajuan pendidikan di sekolah sangat bergantung pada kemampuan kepala sekolah menerima, merumuskan dan mengembangkan kebijakan pendidikan. Selama ini, menurut Idrus (2009:128) setelah otonomi pendidikan diberlakukan ternyata banyak pihak baik pihak sekolah maupun pemerintah daerah belum memahami apa yang seharusnya dilakukan. Hal ini tentu saja pertama sekali terkait dengan respons dari pihak sekolah atau pemerintah daerah sendiri terhadap upaya peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan.

Mengacu pada asumsi di atas, maka masalah yang diteliti dibatasi pada respons kepala sekolah di tingkat satuan pendidikan khususnya kepala sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Binjai tentang kebijakan pemerintah dan pemerintah kota Binjai dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Berhubungan begitu banyaknya kebijakan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu, maka dalam penelitian ini penulis membatasi pada kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). SPMP didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 63 Tahun 2009 yang terbit pada tanggal 29 September 2009. SPM didasari pada Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 dan UN didasari oleh terbitnya Permendiknas Nomor 45 dan 46 Tahun 2010 tentang Kriteria Lulusan dan Pelaksanaan Ujian Nasional.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas, maka masalah-masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat?
2. Bagaimana respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah daerah?
3. Bagaimana implementasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan?
4. Bagaimana hubungan respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam implementasi penjaminan mutu di satuan pendidikan?
5. Bagaimana hubungan respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi penjaminan mutu di satuan pendidikan?
6. Bagaimana hubungan respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah?
7. Bagaimana hubungan respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi penjaminan mutu di satuan pendidikan?

E. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respons kepala sekolah sebagai pemimpin di satuan pendidikan terhadap

kebijakan pendidikan pemerintah pusat dan kebijakan pendidikan pemerintah daerah dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan.

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui reaksi, tanggapan atau jawaban (respons) kepala sekolah tentang kebijakan pemerintah pusat
- b. Mengetahui reaksi, tanggapan atau jawaban (respons) kepala sekolah tentang kebijakan pemerintah daerah
- c. Mengetahui bagaimana implementasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan (sekolah)
- d. Mengetahui bagaimana hubungan respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat
- e. Mengetahui bagaimana hubungan respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah daerah
- f. Mengetahui bagaimana hubungan respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- g. Mengetahui bagaimana hubungan respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi penjaminan mutu di satuan pendidikan

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah perkembangan khazanah pengetahuan dalam kerangka penjaminan mutu; dan memberi

sumbangan pemikiran bagi pembuat dan pelaksana kebijakan pendidikan baik di tingkat pusat, daerah, maupun satuan pendidikan untuk dapat secara bersama-sama mendorong terlaksanannya upaya penjaminan mutu pendidikan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan masukan yang sangat berarti bagi :

- a. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) sebagai anasir pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan dengan memperhatikan kondisi riil di daerah dan satuan pendidikan.
- b. Dinas Pendidikan (Disdik) kota Binjai sebagai satuan perangkat kerja pemerintah kota Binjai yang menangani urusan pendidikan dalam menjabarkan kebijakan pusat dan merumuskan kebijakan operasional dengan memperhatikan kondisi riil dan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan.
- c. Kepala Sekolah SMP di kota Binjai sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan sekolah (*school policy*) untuk dapat meningkatkan kemampuan akseptabilitas dan pemahamannya terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan.

G. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini diarahkan pada Kepala Sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berjumlah 40 (empat puluh) orang. Kepala Sekolah yang menjadi sasaran dalam penelitian ini berasal dari sekolah negeri dan swasta yang ada di kota Binjai, Sumatera Utara.

Di samping itu, penelitian ini melibatkan guru dan siswa di SMP dimaksud sebagai responden. Hal ini bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian yang berfokus kepada Kepala Sekolah. Guru yang dilibatkan sebagai responden berjumlah 2 orang pada masing-masing sekolah, sedangkan siswa berjumlah 3 orang untuk masing-masing sekolah.

H. Asumsi Penelitian

Penelitian ini didasarkan atas asumsi dasar sebagai berikut :

1. Respons kepala sekolah terhadap setiap kebijakan pendidikan pastilah berbeda-beda terutama dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan. Perbedaan respons ini terkait dengan keterbatasan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah. Persoalannya ialah manakala campur tangan pemerintah itu (kebijakan pendidikan) tidak disikapi secara positif oleh kepala sekolah, tentu saja semuanya akan sia-sia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, respons kepala sekolah dalam implementasi setiap kebijakan pendidikan memberikan kelancaran dan kesuksesan setiap program pembangunan pendidikan di satuan pendidikan dalam upaya penjaminan mutu pendidikan.
2. Pada dasarnya implementasi kebijakan pendidikan berguna untuk menvalidasi keputusan kebijakan yang dipilih dalam realitas pendidikan. Dalam implementasi, keputusan kebijakan diidentifikasi dan disesifikan sehingga program kerja menjadi jelas. Di sinilah peran

strategis *desicion maker* di satuan pendidikan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan tersebut.

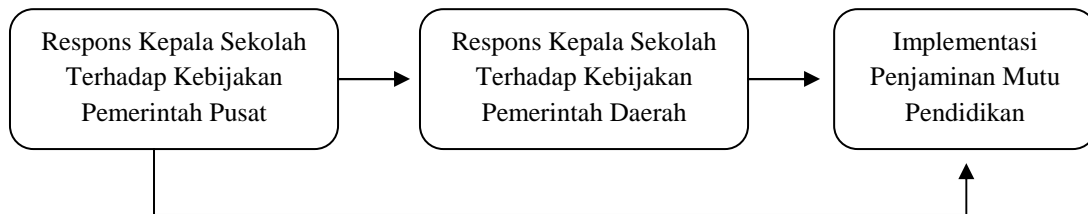
3. Reaksi, tanggapan atau jawaban kepala sekolah dalam kewenangannya sebagai bagian dari implikasi konsep otonomi satuan pendidikan akan sangat menentukan terlaksananya setiap kebijakan pendidikan di sekolah. Melalui *school policy* yang mendukung setiap kebijakan pendidikan akan mempercepat dan mempermudah terlaksananya upaya penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

I. Hipotesa Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga variabel yang dirumuskan dua variabel bebas (X_1 dan X_2) dan satu variabel terikat (Y). Variabel bebas meliputi respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat (X_1) dan respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah daerah (X_2), sedangkan variabel terikatnya adalah implementasi penjaminan mutu pendidikan (Y).

Dalam penelitian ini dirumuskan tiga hipotesa asosiatif untuk mencari hubungan antar variabel, dan tiga hipotesa deskriptif untuk menggambarkan variabel-variabel yang diteliti.

1. Paradigma adalah hubungan yang terjadi antara setiap variabel-variabel dalam penelitian, yaitu hubungan antara X_1 , X_2 dan Y yang digambarkan dengan hubungan statistik berikut di bawah ini :



Bagan 1.1
Hubungan Antara Variabel

2. Rumusan hipotesa penelitian berdasarkan paradigma penelitian dan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :
 - a. Terdapat hubungan antara respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat dengan implementasi penjaminan mutu pada satuan pendidikan
 - b. Terdapat hubungan antara respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah daerah dengan implementasi penjaminan mutu pada satuan pendidikan
 - c. Terdapat hubungan antara respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
 - d. Terdapat hubungan antara respons kepala sekolah terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan implementasi penjaminan mutu pada satuan pendidikan

J. Metodologi Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada realita atau gejala yang dapat diklasifikasikan, relatif, konkrit, terukur, dan memiliki hubungan sebab akibat. Sehingga penelitian ini diarahkan pada penelitian populasi.

Proses dalam penelitian ini lebih bersifat deduktif dan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah yang ada, sehingga menemukan keselarasan dengan konsep atau teori pendukung. Oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang berbentuk kuesioner dengan pertanyaan yang berisi dengan penggalian informasi terhadap responden tentang keadaan yang sebenarnya. Informasi tersebut dalam bentuk persepsi, pendapat dan pengetahuan yang dimiliki responden terhadap masalah yang diteliti.

Pengumpulan data dan analisa data dilakukan dengan menggunakan hasil-hasil yang diberikan responden terhadap pengisian kuesioner penelitian. Pengolahan dan analisis hasil penelitian dengan menggunakan dasar-dasar statistik untuk penelitian di bidang pendidikan.